



Nama : Daud Eliezar

Riwayat Pekerjaan : - BPS Provinsi Kalimantan Tengah

(1996 - 2001)

- Pusdiklat BPS (2002 - sekarang)

Riwayat Pendidikan : - Akademi Ilmu Statistik (1996)

- Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (2000)

- Institut Teknologi Sepuluh November (2010)

Nomor HP: 081213748545

Alamat e-mail : desinaga@bps.go.id

TUJUAN PEMBELAJARAN:

➤ Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menanamkan nilai dan membentuk sikap dan perilaku patuh pada standar etika publik yang tinggi

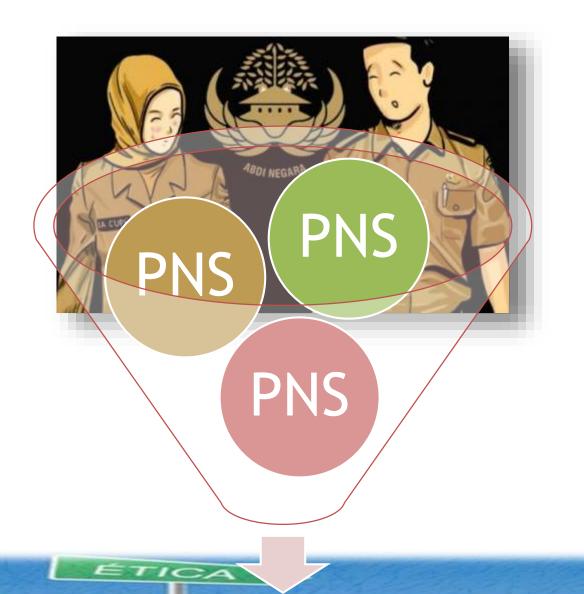
INDIKATOR HASIL BELAJAR

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

- 1. Memiliki Pemahaman Kode Etik dan Perilaku Pejabat Publik;
- 2. Memiliki Pemahaman bentuk-bentuk Kode Etik dan implikasinya; dan
- 3. menganalisis dan menilai ilustrasi aktualisasi nilai dasar etika publik.













STANDAR ETIKA

Etika Kekuasaan

Etika Publik

I. KODE ETIK DAN PERILAKU PEJABAT PUBLIK

PENGERTIAN ETIKA

Weihrich dan Koontz (2005:46):

 "the dicipline dealing with what is good and bad and with moral duty and obligation".

Collins Cobuild (1990:480):

• "an idea or moral belief that influences the behaviour, attitudes and philosophy of life of a group of people".

Ricocur(1990):

 sebagai tujuan hidup yang baik bersama dan untuk orang lain di dalam institusi yang adil.

ETIKA VS MORAL

ETIKA

- Etika berasal dari bhs Yunani : ethos, yg berarti kebiasaan atau watak.
- Etiquet berasal dari bhs Perancis sdgkan dlm bhs Indonesia etiket;
- Etika merupakan pola perilaku atau kebiasaan yang baik dan dapat diterima oleh lingkungan

MORAL

- Moralitas atau moral, berasal dari bhs latin mos (jamak moros) yg berarti cara hidup atau kebiasaan.
- Sedangkan dalam pengertian moralitas dipahami sbg nilainilai tertentu yg diyakini oleh seseorang atau organisasi

MENURUT KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA

ETIKA

 Ilmu tentang kesusilaan yang menentukan bagaimana patutnya manusia hidup dalam masyarakat: apa yang baik dan apa yang buruk

MORAL

 Ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya, akhlak, budi pekerti, susila.

ETIKA PUBLIK

Etika Publik merupakan refleksi tentang standar/norma yang menentukan baik/buruk, benar/salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik.

Blak-blakan MenPAN RB Soal Kinerja PNS

Danang Sugianto - detikFinance

Berikut wawancara khusus **detikFinance** dengan Menteri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Asman Abnur beberapa akhir pekan lalu:

Apa Permasalahan ASN dan PNS yang Paling Fundamental?

Kinerja. Karena kalau di swasta setiap unit dituntut target, setiap individu diukur apa yang dia kontribusikannya. Sementara di ASN dan PNS beda sekali dengan swasta. Sekarang saya mencoba peralihan. Karena KemenPAN RB ini sebagai sebuah kementerian bertanggung jawab di bidang itu, maka saya fokus beberapa hal.

Contoh membuat pengairan tapi sumber airnya enggak ada. Sudah selesai, tapi tidak pernah dialiri air. Harusnya kan dipikirkan dulu sumber airnya.

PRINSIP-PRINSIP ETIKA



(Justice)

Nilai-Nilai Dasar Etika Publik

- Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi Negara Pancasila.
- ► Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.
- Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.
- ► Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian.
- ► Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif.
- Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur.
- Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik.
 - Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah.

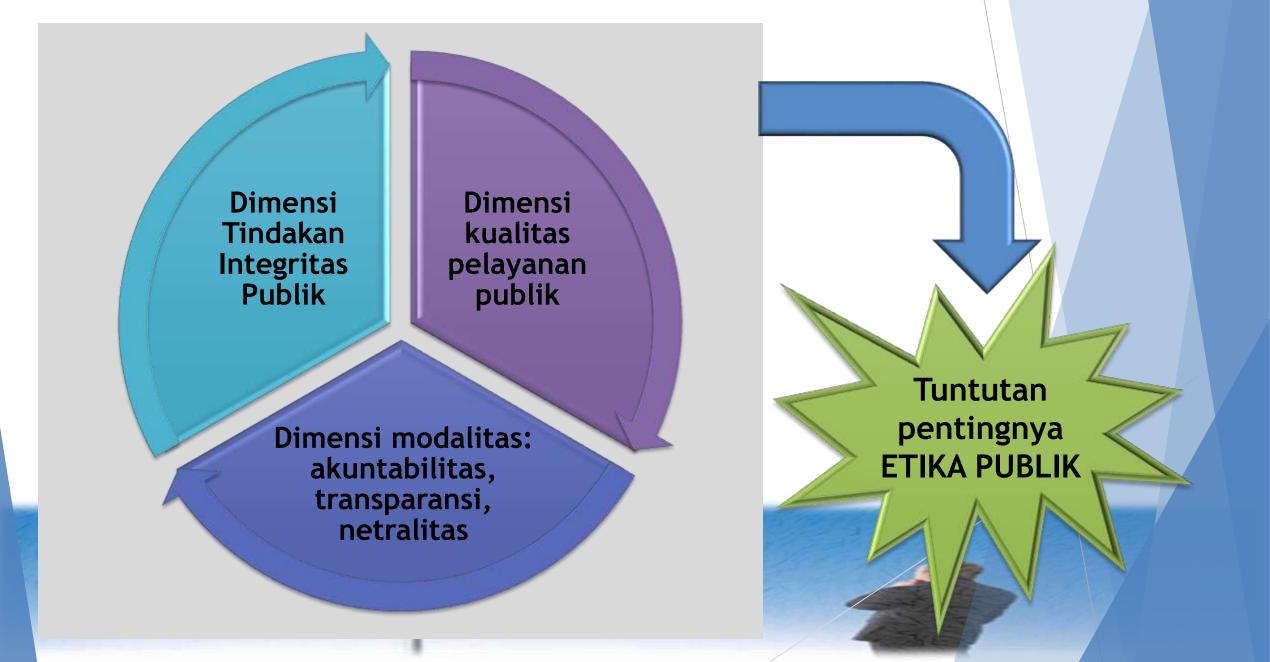
Lanjutan...

- Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun.
- ► Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi.
- Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama.
- Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai.
- ► Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan.
- Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir.

Definisi Dan Lingkup Etika Publik

- Pelayanan publik yang berkualitas dan relevan.
- Sisi dimensi reflektif, Etika Publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi.
- Modalitas Etika, menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual.

DIMENSI ETIKA PUBLIK



Tuntutan Etika Publik dan Kompetensi

"the right man on the right job"

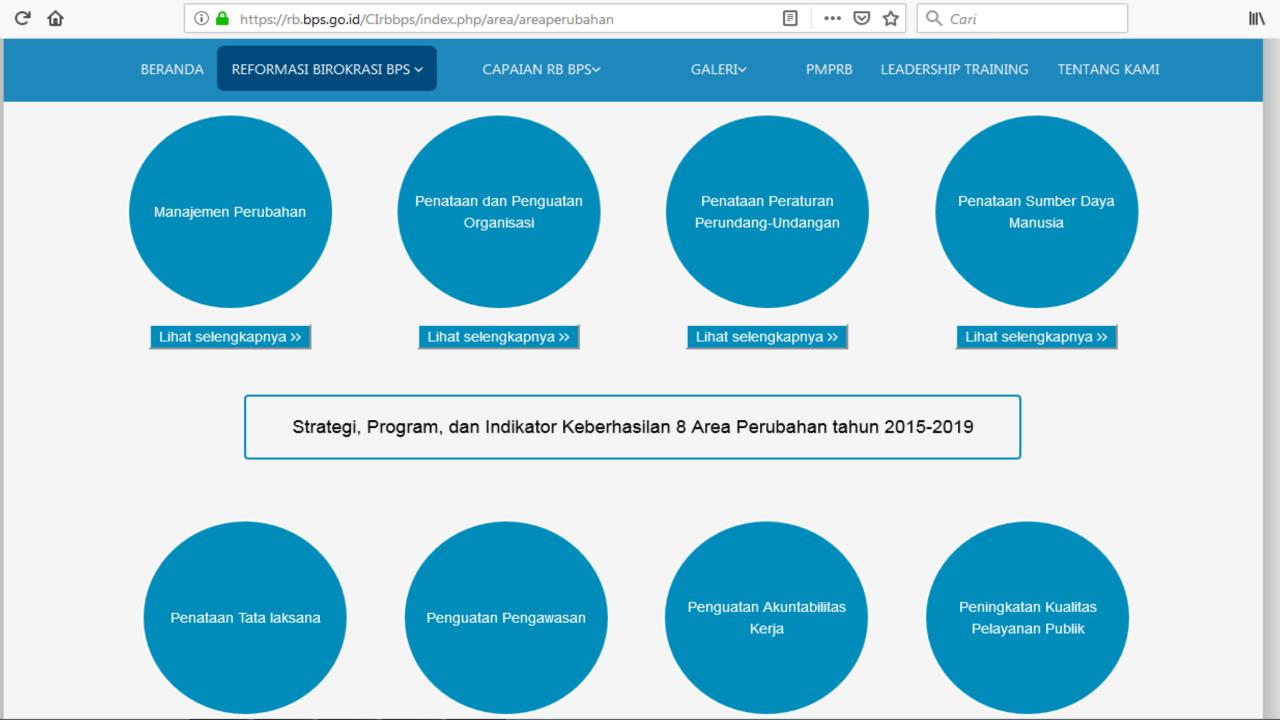
PERUBAHAN MINDSET PERILAKU PEJABAT PUBLIK





ETICA





II. BENTUK-BENTUK KODE ETIK DAN IMPLIKASINYA;

- Pentingnya etika dalam urusan publik:
 - ▶ kode etik, pedoman bertindak dan berperilaku
 - pelayan publik yang bermartabat dan luhur
 - kepercayaan (trust) yang tinggi kepada aparatur pemerintah
- ► Penggunaan kekuasaan: legitimasi kebijakan
 - Kekuasaan yang paling kuat adalah kekuasaan yang mempunyai legitimasi etis (dilandasi etika dan perilaku baik)
 - Rumusan kebijakan dan cara pelayanan publik dilandasi dengan nilainilai kebenaran, pengabdian yang tulus kepada masyarakat, komitmen kepada kesejahteraan warga
- Konflik kepentingan

Campuran kepentingan pribadi dan organisasi

Pengaruh buruk dari adanya konflik kepentingan

- ▶ Aji mumpung (*self dealing*); memanfaatkan kedudukan politis untuk kepentingan yang sempit dan sistem nepotisme;
- ► Menerima/memberi suap (bribery, embezzlement, graft);
- Menyalahgunakan pengaruh pribadi (influence peddling); memanfaatkan pengaruh untuk kepentingan karir atau bisnis yang sempit.
- Pemanfaatan fasilitas organisasi/lembaga untuk kepentingan pribadi.
- ► Pemanfaatan informasi rahasia; mengacaukan kedudukan formal dengan keuntungan yang diperoleh secara informal;
- Loyalitas ganda (outside employment, moonlighting); menggunakan kedudukan dalam pemerintahan untuk investasi pribadi.

9 Azas Sumber kode etik administrasi publik (ASPA: American Society for Public Administration 1981)

1) Pelayanan kepada masyarakat adalah di atas pelayanan kepada diri-sendiri.

- 2) Rakyat adalah berdaulat dan mereka yang bekerja dalam lembaga pemerintah pada akhirnya bertanggungjawab kepada rakyat.
- 3) Hukum mengatur semua tindakan dari lembaga pemerintah. Apabila hukum dan peraturan itu dirasa bermakna ganda, kurang bijaksana atau perlu perubahan, kita akan mengacu sebesar-besarnya kepada kepentingan rakyat sebagai rujukan.

4) Manajemen yang efisien dan efektif adalah dasar bagi administrasi publik.

9 Azas Sumber kode etik administrasi publik (ASPA: American Society for Public Administration 1981)

- 6) Perlindungan terhadap kepercayaan rakyat adalah hal yang sangat penting. Konflik kepentingan, penyuapan, hadiah, atau favoritisme yang merendahkan jabatan publik untuk keuntungan pribadi tidak dapat diterima.
- 7) Pelayanan kepada masyarakat menuntut kepekaan khusus dengan ciri-ciri keadilan, keberanian, kejujuran, persamaan, kompetensi, dan kasih-sayang.
- 8) Hati nurani memegang peran penting dalam memilih arah tindakan. Ini memerlukan kesadaran akan makna ganda moral dalam kehidupan, dan pengkajian tentang prioritas nilai; tujuan yang baik tidak pernah membenarkan cara yang tak bermoral (good ends never justify immoral means).
- 9) Para administrator negara tidak hanya terlibat untuk mencegah hal yang salah, tetapi juga untuk mengusahakan hal yang benar melalui pelaksanaan tanggung-jawab dengan penuh semangat dan tepat pada waktunya.

KODE ETIK

- Kode Etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus, sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuanketentuan tertulis.
- Kode Etik juga dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan.
- ► Tujuan kode etik agar profesional memberikan jasa sebaikbaiknya kepada pemakai atau stakeholdernya.
- Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional.

Sumber-sumber Kode Etik ASN

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Perang
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji PNS
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
- ▶ Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
- Peraturan Ka BPS No 39 Tahun 2010 tentang visi, misi, nilai-nilai inti dan kode etik stat_BPS
 - Perka BPS Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan BPS
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS



POKOK-POKOK ETIKA KEHIDUPAN BERBANGSA MENURUT TAP MPR NO VI/MPR/2001

- 1. Etika sosial dan Budaya
- 2. Etika politik dan pemerintahan
- 3. Etika Ekonomi dan bisnis
- 4. Etika penegakan hukum yang berkeadilan
- 5. Etika Keilmuan
- 6. Etika Lingkungan

Prioritas Etika Kehidupan Berbangsa (TAP MPR NO VI/MPR/2001):

- ▶ Kejujuran
- ► Amanah
- ► Keteladanan
- ► Sportifitas
- ▶ Disiplin
- Etos kerja

- ► Kemandirian
- ► Sikap toleransi
- ► Rasa malu
- ► Tanggung jawab
- Menjaga kehormatan
- ► Menjaga martabat diri sebagai bangsa

III. ILUSTRASI AKTUALISASI ETIKA APARATUR SIPIL NEGARA.

AKTUALISASI ETIKA APARATUR SIPIL NEGARA

- Pemanfaatan Sumberdaya Publik (contoh: mobil dinas)
- ► Absen Sidik Jari
- ► Penerimaan Tenaga Honorer
- ► Pemberian Hadiah Atau Cindera Mata
- ► Konflik Kepentingan Dalam Pengadaan
- Pelantikan Walikota Di Penjara
- Terpidana Korupsi Menjabat Kembali

LANJUTAN...

- ► Whistle Blower Atau Membocorkan informasi
- ► Pengunduran Diri Pejabat
- ► Melanggar Hukum
- ► Perbuatan Tercela
- Kebocoran Ujian Nasional
- Penegak Hukum Yang Jujur



KI HAJJAR DEWANTARA

Ki Hadjar Dewantara:
Ing ngarso sung tulodho;
Ing madya mangun karso;
Tut wuri handayani





Menjadi TELADAN



Berarti :

- Berfikir (mind setting) bahwa apa yang dikerjakan akan selalu dicontoh orang lain.
- Setiap perilakunya selalu terkendali karena sadar bahwa orang disekelilingnya akan memperhatikan.
- □ Tidak ingin melakukan hal hal yang tidak terpuji.
- Melakukan hal-hal yang positif dan sudah menjadi kebiasaannya.
- Dapat mengendalikan setiap langkah baik didalam maupun diluar dinas.

4 hal yang perlu dilakukan agar menjadi TELADAN

- 1. Tunjukkan sikap loyal dan disiplin.
- 2. Tetapkan standar kerja yang tinggi tapi rasional.
- 3. Jadikan diri sendiri sebagai teladan melalui kerja keras.
- 4. Lakukan hal-hal positif untuk membangun keteladanan anda.

Kiat Praktek Keteladanan

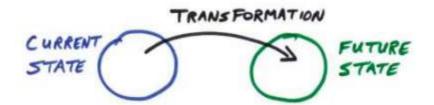


- Mulai dari diri sendiri
- Mulai dari hal yang kecil/mudah
 - Mulai dari sekarang

Perenungan

Tuntutan Sektor Publik ke Depan





Smart Government
Optimalisasi Teknologi
Informasi dan Digitalisasi



Open Government
Tuntutan Transparansi dan
Akuntabilitas Publik



Big Data Driven Policy
Media Sosial menjadi refleksi
tuntutan publik terhadap pemerintah





GOVERNMENT EFFECTIVENESS INDEX



TRANSFORMASI BIROKRASI BERKELAS DUNIA 2024



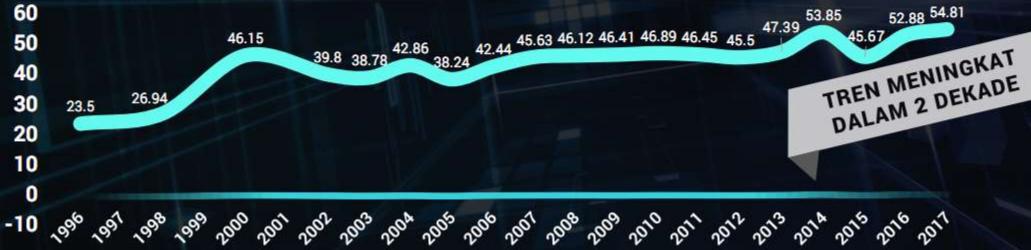
INGKA

B

Н

GAMBARAN PERSEPSI:

- KUALITAS LAYANAN PUBLIK
- KUALITAS ASN
- INDEPENDENSI DARI TEKANAN POLITIK
- KUALITAS FORMULASI & IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
- KREDIBILITAS KOMITMEN PEMERINTAH



Source: The World Bank, TheGlobalEconomy.com (2019)

ROAD MAP PEMBANGUNAN

Aparatur Sipil Negara

BIROKRASI BERKELAS DUNIA

RPJM 3 (2015-2019) ---

RPJM 2 (2010-2014) 2
REFORMASI BIROKRASI

RPJM 1 (2005-2009)
GOOD GOVERNANCE

→SMART ASN

Profil:

INTEGRITAS

NASIONALISME

PROFESIONALISME

WAWASAN GLOBAL

IT & BAHASA ASING

HOSPITALITY

NETWORKING

ENTREPRENEURSHIP

WORLD CLASS
GOVERNMENT 2024

DIGITAL TALENT
DIGITAL LEADER

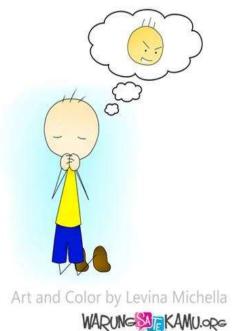


Be happy to change your goals, but never change your values.

His Holiness Dalai Lama

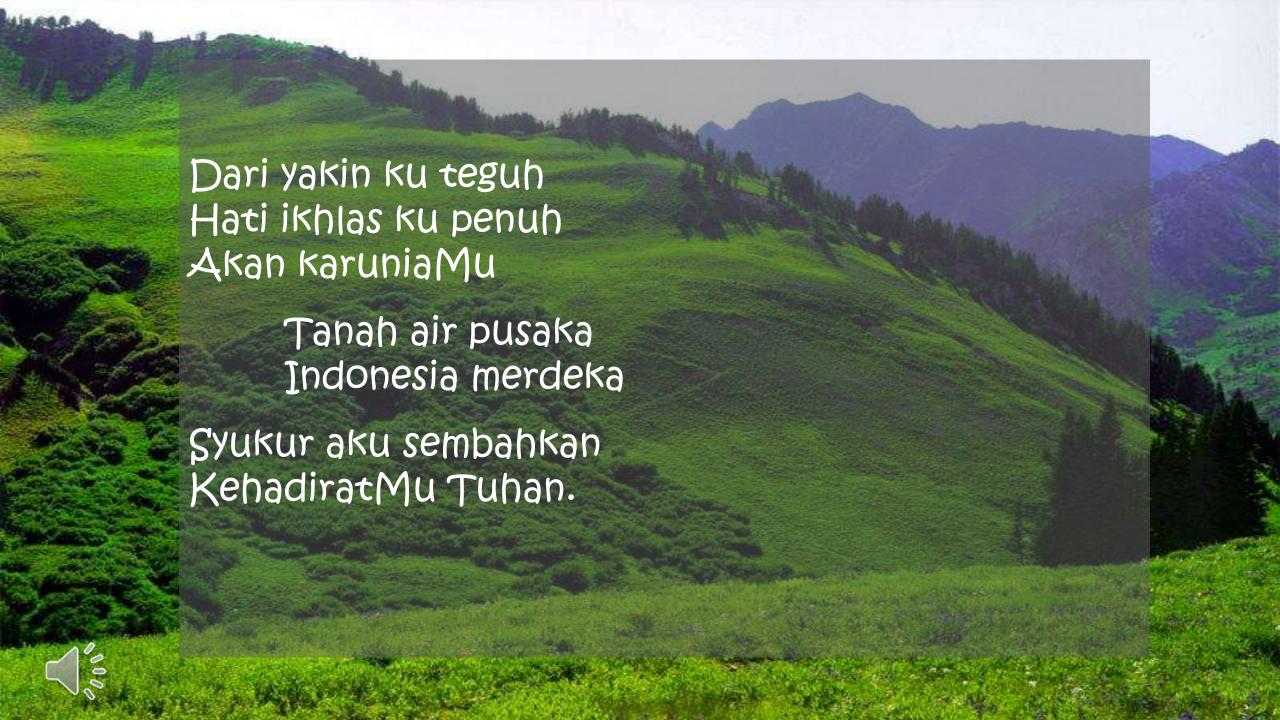


Membalas kejahatan dengan kejahatan itu biasa, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan itu mulia









TUGAS EVALUASI PESERTA

- TULISKAN DALAM SECARIK KERTAS
- TULISKAN NAMA DAN NOMOR ABSEN
- ▶ IDENTIFIKASI FIGUR TELADAN DI UNIT KERJA SAUDARA:
 - Nama
 - Jabatan
 - Sosok figur teladan
 - Komitmen diri
- Buatlah rencana aktualisasi nilai etika dalam rencana kegiatan kerja saudara:
 - Jenis kegiatan
 - Jenis nilai etika

Tehnik aktualisasi

Analisis dampak

PERILAKU PEJABAT PUBLIK

► FILM SANG BIROKRAT

DISKUSI KELOMPOK

- GOLONGAN III (6 KELOMPOK)

DISKUSI KELOMPOK

► DIHUBUNGKAN DENGAN SUMBER-SUMBER KODE ETIK YANG ADA DI DALAM MODUL

FILM "SEBUAH PILIHAN"

- ► DISKUSI KELOMPOK
- SETIAP KELOMPOK MEMBAHAS DARI FILM YANG DILIHAT MENURUT ASPEK:
 - ► KELOMPOK I: KEDISIPLINAN
 - ► KELOMPOK II: ETOS KERJA
 - ► KELOMPOK III: INTEGRITAS
 - KELOMPOK IV: HUBUNGAN DENGAN ATASAN
 - ► KELOMPOK V: HUBUNGAN DENGAN SESAMA PEGAWAI
 - KELOMPOK VI: HUBUNGAN DENGAN MASYARAKAT
 - KELOMPOK VII: HUBUNGAN DENGAN KELUARGA

KESIMPULAN DISKUSI

▶ Tingkat moralitas seseorang akan dipengaruhi oleh latar belakang budaya, pendidikan, dan pengalaman; karakter individu adalah sebagian diantara faktorfaktor yang mempengaruhi tingkat moralitas seseorang

Diskusi Kelompok

Identifikasi Aktualisasi Etika Publik

- ► Peserta dibuat dalam 4 (empat) kelompok
- Dilihat dari sisi
 - ► Kelompok I: dalam penyelenggaraan pelayanan publik
 - ► Kelompok II: dalam rangka melawan korupsi
 - ► Kelompok III: dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi
 - ► Kelompok IV: dalam rangka meningkatkan integritas publik